

MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* (BUKTI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)

Muhammad Kadafi¹⁾, Amirudin²⁾

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Jl. Ciptomangunkusumo Kampus
Gunung panjang, Samarinda 75131

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Jl. Ciptomangunkusumo Kampus
Gunung panjang, Samarinda 75131

Abstract

The research aims to determine districts / cities that experience fiscal distress financial conditions and factors that affect the financial condition of district / city fiscal distress. The research method uses a cluster test analysis tool using K-mean cluster hierarchy and multiple regression tests consisting of F test and R² test. The results of the research resulted in 3 clusters namely cluster 1 containing 407 districts / cities that have low Zscore FinancialIndependence, low Zscore Budgetary Solutions, and low Zscore (DSCR). Cluster 2 contains 64 districts / cities that have Zscore FinancialIndependence above average, Zscore BudgetarySolvency above average, and low Zscore (DSCR). Cluster 3 contains 37 districts / cities that have low Zscore FinancialIndependence, Zscore BudgetarySolvency which are above average, and Zscore DSCR that are above average. Based on the F test, that is to test simultaneously the influence of Financial Independence and Budgetary Solvency variables on DSCR. The value of Fcount is 387,182, this value is greater than Ftable 3,013 (Fcount > Ftable). So it can be concluded that Financial Independence and Budgetary Solvency have an effect on DSCR.

Keywords: *Budgetary Solvency, DSCR, Fiscal Distress, Financial Independence*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kabupaten/kota yang mengalami kondisi keuangan fiscal distress dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan fiscal distress kabupaten/kota. Metode penelitian menggunakan alat analisis uji klaster menggunakan klaster hierarki K-mean Klaster dan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji R². Hasil penelitian menghasilkan 3 klaster yaitu klaster 1 berisi 407 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang rendah, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 2 ini berisi 64 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence di atas rata-rata, Zscore BudgetarySolvency di atas rata-rata, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 3 ini berisi 37 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang di atas rata-rata. Berdasarkan, uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh variabel Financial Independence dan Budgetary Solvency terhadap DSCR. Besarnya nilai Fhitung sebesar 387,182 nilai ini lebih besar dari Ftable 3,013 (Fhitung > Ftable). Sehingga dapat disimpulkan Financial Independence dan Budgetary Solvency berpengaruh terhadap DSCR.

Kata Kunci: *Budgetary Solvency, DSCR, Fiscal Distress, Financial Independence*

PENDAHULUAN

Istilah kesulitan fiskal (*fiscal distress*) dikemukakan sesuai dengan pendekatan metodologis yang berbeda untuk merujuk pada realitas yang sama (Hendrick, 2004). Cabaleiroet *et al.* (2013) menunjuk dalam banyak kasus berbagai istilah yang ditunjukkan dalam literatur telah digunakan secara bergantian. Pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya melalui anggaran yang dimiliki selama beberapa periode tahun anggaran dalam literature keuangan publik digunakan istilah kesulitan keuangan (*fiscal distress*). Kloha *et al.* (2005) mendefinisikan kesulitan fiskal (*fiscal distress*) sebagai kegagalan untuk memenuhi standar dalam hal posisi operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat dan sumber daya selama bertahun-tahun secara berturut-turut.

Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia anggarannya banyak didominasi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdampak pada kondisi keuangan APBD dipengaruhi oleh kondisi keuangan APBN.

Kondisi keuangan pemerintah pusat saat ini sangat tergantung dengan utang luar negeri. Besarnya utang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kondisi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin melemah. Berikut ini data yang peneliti rangkum dari berbagai sumber :

Tabel 1.

Jumlah Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Utang (Dalam Triliun)	2.608,78	3.165,13	3.515,46	3.999,25	4.418,3
Nilai Tukar Rp Terhadap \$ US	12.030,00	14.650,00	13.645,00	13.500,00	14.684,00

Sumber : dirangkum dari berbagai sumber

Peningkatan utang luar pada tabel 1 tidak diikuti dengan penambahan anggaran untuk kabupaten/kota di Indonesia, tetapi justru terjadi penurunan anggaran. Kondisi keuangan negara yang semakin sulit berdampak kepada kondisi keuangan pemerintah

daerah. Dengan kondisi keuangan yang semakin menurun tentu saja berdampak pada pengeluaran dana untuk pembangunan.

Penelitian tentang kondisi keuangan sektor bisnis telah banyak dilakukan, berbeda dengan penelitian untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, masih sedikit dilakukan. Penelitian untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah menggunakan berbagai dimensi dan indikator, diantaranya Groves *et al.*, 1981; Brown, 1993; Brown, 1996; Hendrick, 2004; Honadle *et al.*, 2003; Kleine *et al.*, 2003; Kloha *et al.*, 2005; Nollenberger *et al.*, 2003; Wang *et al.*, 2007; Zafra-Gómez *et al.*, 2009a; Zafra-Gómez *et al.*, 2009b. Berdasarkan uraian di atas, sangat penting untuk melakukan penelitian untuk memprediksi serta menganalisis *fiscal distress* (kesulitan fiskal) pemerintah daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota mana saja di Indonesia yang mengalami kondisi keuangan *fiscal distress* ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keuangan *fiscal distress* kabupaten/kota ?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kabupaten/kota yang mengalami kondisi keuangan *fiscal distress* dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan *fiscal distress* kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengelompokkan/mengklaster kabupaten/kota berdasarkan *financial independence*, *budgetary solvency* dan DSCR. Selanjutnya *financial independence* dan *budgetary solvency* akan diregresi dengan DSCR. Populasi penelitian ini adalah kabupaten/kota yang menerbitkan laporan realisasi anggaran dan neraca selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini menjadikan semua populasi menjadi sampel penelitian sebanyak 508 kabupaten/kota di Indonesia.

Metode analisis data dengan tahapan : (a) melakukan uji klaster menggunakan klaster hierarki K-mean Klaster, dengan 3 langkah Hair *et al.* (2014), (b) melakukan uji asumsi klasik, (c) melakukan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji R².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Klaster

Pengklasteran terhadap 508 kabupaten/kota berdasarkan *Financial Independence*, *Budgetary Solvency* dan *Debt Service Covarage Ratio (DSCR)*. Berikut ini adalah Tabel 2 Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya.

Tabel 2.
 Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya

	Klaster		
	1	2	3
Zscore(FinancialIndependence)	-.24331	1.96713	-.72618
Zscore(BudgetarySolvency)	-.22857	.06780	2.39695
Zscore(DSCR)	-.16730	-.34638	2.43944
Jumlah Kab/Kota	407	64	37

Pada output di Tabel 2 Final Hasil Klaster dan Jumlah Anggotanya dapat disimpulkan, bahwa Dalam klaster 1 ini beranggotakan 407 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang rendah, dan Zscore DSCR yang rendah. Klaster 2 beranggotakan 64 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence di atas rata-rata, Zscore BudgetarySolvency di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang rendah. Klaster 3 beranggotakan 37 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang di atas rata-rata.

Analisis Regresi Berganda

Pengujian pengaruh *Financial Independence* dan *Budgetary Solvency* terhadap *DSCR* dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *DSCR* dan variabel mana yang lebih dominan. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3.
 Hasil Analisis Regresi

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients (B)</i>	thitung	Sig	Keterangan
(Constant)	-0,700			
FinancialIndependence (X1)	- 0, 258	- 14,705	0,000*	Signifikan

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t hitung	Sig	Keterangan
Budgetary Solvency (X2)	2,528	20,028	0,000*	Signifikan

R = 0,78

R Square = 0,61

F hitung = 387,182

F tabel = 3,013

Sig F = 0,000

Sumber : Data di olah

Keterangan : - Jumlah data = 508

- * Signifikan pada α 5%

- Variabel Dependen DSCR (Y)

Hasil regresi menunjukkan nilai R^2 adalah 0,61 hal ini berarti 61% variasi DSCR dapat dijelaskan oleh variabel fisik Independence dan Budgetary Solvency. Sedangkan sisanya (100% - 61% = 39%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas dinyatakan dalam persamaan:

$$DSCR = -0,700 - 0,258 \text{Financial Independence} + 2,528 \text{Budgetary Solvency} + e$$

Berdasarkan Tabel 3, uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh variabel Financial Independence dan Budgetary Solvency terhadap DSCR. Besarnya nilai F_{hitung} sebesar 387,182 nilai ini lebih besar dari F_{tabel} 3,013 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) pada $\alpha = 5\%$. Ketika kedua variabel tersebut diregres secara serentak terhadap DSCR, nilai t-statistik untuk Budgetary Solvency adalah sebesar 20,028 dan Financial Independence adalah - 14,705. Financial Independence lebih kecil daripada Budgetary Solvency, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh Budgetary Solvency terhadap DSCR lebih kuat daripada pengaruh Financial Independence terhadap DSCR.

PEMBAHASAN

Kondisi keuangan pemerintah daerah menurut Berne dan Schramm (1986) yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Groves dkk. (1981) dan Nollenberger *et al.* (2003) menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai layanannya secara berkelanjutan.

Groves dkk. (1981) dan Nollenberger *et al.* (2003) membedakan antara solvabilitas uang tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas tingkat

layanan. Wang *et al.* (2007) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai tingkat solvabilitas keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari faktor solvabilitas tunai, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas tingkat layanan

Penelitian ini mengadopsi alat yang sama untuk mengukur fiscal distress yaitu solvabilitas anggaran dan menambahkan *financial independence* pada 508 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian ini melakukan kluster terhadap 508 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan pengukuran solvabilitas anggaran, financial independence dan DSCR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terdapat sebanyak 407 kabupaten kota yang memiliki fiscal independence, budgetary solvency dan DSCR di bawah rata-rata. Kondisi terbaik pada kluster 3 yang beranggotakan 37 kabupaten/kota di Indonesia, memiliki fiscal independence di bawah rata-rata, budgetary solvency di atas rata-rata dan DSCR di atas rata-rata. Penelitian ini mendukung hasil temuan Sebastiana dan Cahyo (2016) bahwa desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur sangat rendah. Ritonga *et al* (2012) yang meneliti kabupaten/kota di pulau jawa menginformasikan bahwa tren rasio solvabilitas anggaran menunjukkan tren menurun. Menurut Ritonga, meskipun rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk menutupi pengeluaran mereka, pemerintah daerah harus berhati - hati dalam tahun fiskal mendatang karena suatu defisit operasi menentukan permulaan kesulitan keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa fiscal independence kabupaten/kota di Indonesia sangatlah rendah, seperti yang dikemukakan oleh CICA (2007) fiscal independence adalah kondisi di mana pemerintah daerah tidak ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar, Menurut Surowka (2018) penyebabnya adalah keraguan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi keuangan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia Haryanto (2017).

Penelitian ini melakukan juga uji regresi linier berganda dengan menggunakan variabel fiscal independence dan budgetary solvency guna memprediksi kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang tercermin dalam DSCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiscal independence dan budgetary solvency berpengaruh terhadap DSCR. Pengaruh terbesar antara fiscal independence dan budgetary solvency terhadap DSCR adalah budgetary solvency.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Anggota klaster yang terbentuk terdiri dari 3 klaster, yaitu klaster 1 berisi 407 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang rendah, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 2 berisi 64 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence di atas rata-rata, Zscore BudgetarySolvency di atas rata-rata, dan Zscore (DSCR) yang rendah. Klaster 3 berisi 37 kabupaten/kota yang memiliki Zscore FinancialIndependence yang rendah, Zscore BudgetarySolvency yang di atas rata-rata, dan Zscore DSCR yang di atas rata-rata.
2. Pengujian secara serentak pengaruh variabel Financial Independence dan Budgetary Solvency terhadap DSCR. Kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel DSCR.

Saran dan keterbatasan penelitian yang peneliti bisa berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa selama tahun 2014-2018, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan belanja yang berbasis manfaat, melakukan penghematan menghindari pemborosan, salah alokasi ataupun mencegah terjadinya kebocoran.
2. Hasil pengklasteran yang terbentuk menunjukkan perbedaan yang sangat besar kemampuan keuangan antar kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah pusat harus membuat formula yang lebih mengeliminasi *horizontal imbalance* antar pemerintah kabupaten/kota.
3. Keterbatasan penelitian ini adalah belum memasukkan variabel bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dalam melakukan pengklasteran kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tersebut serta melakukan *treatment* dengan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan wilayah Indonesia barat, Indonesia tengah dan Indonesia timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, K.W. (1993). *The 10-point Test of Financial Condition: Toward An Easy-to-use Assessment Tool for Smaller Cities*, Government Finance Review, Vol. 9, pp. 21-26.
- _____. (1996). *Trends in Key Ratios Using the GFOA Financial Indicators Databases 1989-1993*, Government Finance Review, Vol. 12, pp. 30-34.
- Berne, R & Schramm, R. (1986). *The Financial Analysis of Governments*, Prentice-Hall.
- Cabaleiro, R., Buch, E., and Vaamonde, A. (2013). *Developing a Method to Assesing themunicipal Financial Health*. The American Review of Public Administration, 43(6), 729-751
- CICA. (1997). *Indicators of Government Financial Condition*, Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto.
- Groves, SM, Godsey, WM & Shulman, MA. (1981). *Financial indicators for local government*, Public Budgeting & Finance, vol. 1, no. 2, pp. 5-19.
- Hair, Joseph F., Hult, G. Thomas M., Ringle, Christian M., and Sarstedt, Marko. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS SEM)*. California: SAGE Publications.
- Haryanto, Joko Tri. (2017). *Mapping the Local Own Resources (PAD) Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014: Quadrant Method Approach*, Jurnal Bina Praja Vol. 9 No. 1 pp. 41-52.
- Hendrick, R. (2004). *Assessing and Measuring the Fiscal Health of Local overnment: Focus on Chicago Suburban Municipalities*, Urban Affairs Review, Vol. 40, pp. 78-114.
- Honadle, B.W., Costa, J.M., and Cigler, B.A. (2003). *Fiscal Health for Local Government*. Academic Press.
- Kleine, R., Kloha, P. & Weissert, C.S. (2003). *Monitoring Local Government Fiscal Health: Michigan's New 10-Point Scale of Fiscal Distress*, Government Finance Review, Vol. 19, No. 3, pp. 18-24.
- Kloha, P., Weissert, C.S. & Kleine, R. (2005). *Developing and Testing A Composite Model to Predict Local Fiscal Distress*, Public Administration Review, Vol. 65, No. 3, pp. 313-323.
- Nollenberger, K., Groves, S.M. & Valente, M.G. (2003). *Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government*, Washington, DC, international City/County Managers Association, Public and Municipal Finance, Vol. 1, Issue 2.
- Ritonga, I. T., Clark, C., and Wickremasinghe, G. (2012). *Assesing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration*. Publicand Municipal Finance, Vol. 1, No. 2.
- Sebastiana.V, Cahyo, Herman. (2016). *Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province*. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 5, no. 2, pp.272-285.
- Surówka, Krzysztof. (2018). *Sources of Income and Financial Autonomy of Local Self-government*, Economics World, Jan.-Feb. 2018, Volume. 6, Nomor. 1, pp 22-33
- Zafra-Gómez, J. L., López-Hernández, A. M., and Hernández-Bastida, A. (2009). *Developing a Model to Measure Financial Conditionin Local Government: Evaluating Service Quality and Minimizing the Effects of the Socioeconomic*

- Environment: An Application to Spanish Municipalities*. The American Review of Public Administration, 39(4), 425-449.
- Wang, X., Dennis, L. & Tu, Y.S.J. (2007). *Measuring Financial Condition: A Study of US states*, Public Budgeting & Finance, Vol. 27, No. 2, pp. 1-21.
- Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández, A.M. & Hernández-Bastida, A. (2009). *Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government*, The American Review of Public Administration, Vol. 39, No. 4, p. 425.
- _____(2009). *Evaluating Financial Performance in Local Government: Maximizing the Benchmarking Value*, International Review of Administrative Sciences, Vol. 75, No. 1, p. 151.